DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Azhani, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar Pradnya* Paramita, cet ke V, Jakarta, 1985.

_____, *Korupsi Dalam Pengelolahan Proyek Pembangunan,* Akademi Pressindo, Jakarta, 1984

Albert Hasibuan, Kompas, 30 Juni 1997.

Ardison Asri, *Diktat Kuliah Hukum Pembuktian*, FH Universitas Bhayangkara, Bekasi, 2007.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Pengelolahan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2001.

EY. Kanter dan Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, FH. Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2005

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi , Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Miftah Toha, *Memindahkan KKN Dari Pusat ke Daerah*, Tekad No. 20/Tahun II, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Ronny I Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1988.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1979.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000..

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi.* Undang-Undang Nomor 30 LN No. 137 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta Bumi Aksara, 2001.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWISTU DASI
JAKARTA RAYA